

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Aan Efendi Dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Achmad Ali dan Wiwie Haryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Alf Ross. 1961. *On The Concepts State and State Organs in Constitutional Law*. Stockholm Institute for Scandinavian Law. Stockholm.
- Ahmad Fikri Hadin. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Cetakan Ke-2. Kencana. Jakarta
- Fahri Hamzah. 2012. *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Yayasan Faham Indonesia. Jakarta.
- F. Anton Susanto. 2004. *Kepolisian dalam Upaya penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. cet 1. Jakarta.
- Fickar Hadjar, dkk, 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
- Georg Jellinek. 1914. *Allgemeine Staatslehre*. Verlag von. O. Häring. Berlin.
- Gunawan A. Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen*. Genta Press. Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2005. *Pure Theory of Law*. Tej. Max Knight. The Lawbook Exchange. Clark.

Henry Campbell. Blacklaw Dictionary. (USA:West Publishing. 1979 )

Idrus Rishan. 2013. *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press,

Indriyanto Seno Adji. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. diadit Media. Jakarta..

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafi ka. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

\_\_\_\_\_. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. Jakarta.

John Alder, *Constitutions and Administrative Law*, (London: The Macmillan Prees LTD, 1989),

Juniarso ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. cet 2*. Nuansa Aulia. Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional.

- Muh. Hasrul, Fajrulrahman Jurdi dan Ahmad Yani. *Hukum Kelembagaan Negara (penguatan Lembaga Negara dalam konstitusi)*. Litera; Yogyakarta.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Cet 1. Pradnya Paramita. Jakarta.1991.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. 2011.
- Michael R. Asimov sebagaimana dikutip dalam Deny Indrayana, “*Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantang Masa Depan*”, (Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2008),
- Muchlis Hamdi, “*State Bodies di Beberapa Negara*”, disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “*Penataan State Auxiliary Bodies dalam sistem Ketatanegaraan*,”
- Nimatul Huda. 2010. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*. UII Press. Yogyakarta.
- Nugraha. Safri et al. 2007. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. (Center For Law And Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Nur Basuki Minarno. . 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. cet. 2*. laksbang Mediatama. Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2011
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti. Jakarta.

- Phillipus M. Hadjon. Et. al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Ridwan. H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Cet 1*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amendemen Konstitusi. Kencana*. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Bab Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta
- Syahrul Yasin Limpo. 2018. *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten*. (Cetakan Pertama) Litera. Yogyakarta.
- Sri Soemantri. 1993. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang- undang Dasar 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sujanto. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Manadi Press. Jakarta.
- SF. Marbun et.al. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Penyunting FH UII Press. Yogyakarta.
- SF.Marbun et.al.. *Peradilan tata Usaha Negara*. Cet 1. Liberty. Yogyakarta. 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*.

Siagian. Sondang P. *Filsafat Administrasi Gunung Agung*. Jakarta. 1970.

Sirajuddin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Titik Triwulan dan Wisnu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

William F. Funk dan Richard, dalam Seamon, *Administrative Law Examples (Explanations)*, 2001),

Yves Meny dan Andrew Knapp. "Government and Politic in Western Europe: Britain. France. Italy. Germany."

#### **JURNAL. MAKALAH DAN WEBSITE**

Aditia Syaprillah. *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 1. Nomor 1. Oktober 2016. h. 107

Abdul Hamid Attamini. *Der Rechtstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*. Makalah disampaikan dalam Dies Natalies ke-42 Universitas Indonesia 17 Agustus 1945. Jakarta. 19 Juli 1994.

A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Jantera, "Komisi Negara", Edisi 12 tahun III, April 2006,

Dengah. H.. Akub. M. S.. Sampurno. S.. & Muchtar. S. (2019). Hand Catch Operation on Corruption Crimes: The Case of the KPK in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*. 81

Donal Fariz. Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. 2019. 5 (2).

Hendra Nurtjahjo . "Lembaga. Badan. dan Komisi Negara Independen di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-35 No. 3 (Juli- September 2005): hal. 280.

Ismail. Ismail & Hapsoro. Fakhris Luthfianto. (2020). The Authority Of The Corruption Eradication Commission In The Prosecution Of Corruption In Indonesia. 10.31838/jcr.07.05.29.

Kirin. Anatoly & Pobezhimova. Nelly & Buravlyov. Yury & Sidorova. Svetlana. (2020). Law against Corruption: Outcomes of Corruption Counteraction in Russia. Journal of Politics and Law. 13. 220. 10.5539/jpl.v13n2p220

R.M.A.B., Kusuma, "Sistem Pemerintahan dengan Prinsip "Checks and Balances", (Jurnal Konstitusi, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2004),  
Suhartono. A.. Karim. M. S.. & Riza. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi. Al-Azhar Islamic Law Review. 1(2). 69

Wawan Heru Suyatmiko. Alvin Nicola. *Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.* Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. 2019 5 (2). 35-56

Jlimly Ashiddiqie. Struktur Nletatanegaraan Indonesia Sete/ah Perubahan Keempat UUD 1945. Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukull1 Nasional VIII. Denpasar. 14-18 Juli 2003.

Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang.* Majalah Yuridika No. 5 dan 6 Tahun XII Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.1997

Laporan akhir tim kompendium hukum tentang lembaga pemberantasan korupsi. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2011

Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>

ICW: Keberadaan Dewan Pengawas KPK Bermasalah  
<https://kumparan.com/kumparannews/icw-keberadaan-dewan-pengawas-kpk-bermasalah-1sV1rze9QZD/full> diakses pada tanggal

Siaran Pers Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2021 Diakses pada laman <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2457-capaian-kinerja-dewan-pengawas-kpk-tahun-2021f> tanggal 14 Juni 2022

Live Streaming - Komisi III DPR RI RDP dengan Pimpinan KPK dan Ketua Dewas KPK Diakses di <https://youtu.be/2j20OHvYyk4> Rabu 10 Maret 2021

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat KOMISI III DPR RI Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM Dan Keamanan) diakses <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-a5c84558bd337fd025f0b7299e307f3d.pdf> pada tanggal 20 Juni 2022

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2647-pengunduran-diri-pimpinan-kpk> diakses pada tanggal 11 Juli 2022

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6457)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Tahun 2020.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2019-2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/ 2019

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst